

Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Ayu Salsabilla

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.

*¹Email: ayu.salsabilla@upnvj.ac.id

Indri Arrafi Juliannisa, SE, ME

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.

*²Email: indri.arrafi@upnvj.ac.id

Dra. Nunuk Triwahyuningtyas, MM

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.

*³Email: nunukwowo@gmail.com

Abstrak

Permasalahan kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta jika diukur dengan persentase penduduk miskin (*Head Count Index*) sudah mengalami penurunan namun cenderung lambat dalam tahun 2014-2019 dan permasalahan ini menjadi tantangan pemerintah karena masih tingginya tingkat kemiskinan pada peringkat pertama di Pulau Jawa dan di atas angka kemiskinan nasional. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang mengalami peningkatan tiap tahunnya akan berdampak pada pengurangan jumlah tabungan rumah tangga, peningkatan IPM yang cenderung sangat lambat dan masih terdapat daerah yang tertinggal di bawah rata-rata nasional, upah minimum yang relatif rendah sehingga masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup layaknya dan jumlah penyerapan tenaga kerja di DIY bergerak sangat lambat karena masih terbatasnya jumlah lapangan kerja di DIY. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah penduduk, upah minimum, penyerapan tenaga kerja berpengaruh sedangkan IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi kemiskinan sehingga menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat serta perbedaan hasil *variable* bebas yang digunakan harus dibuktikan lebih lanjut secara teori.

Kata Kunci: Kemiskinan, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, upah minimum, Penyerapan tenaga kerja

Analysis of Poverty Factors in the Regency/City of the Special Region of Yogyakarta

Abstract

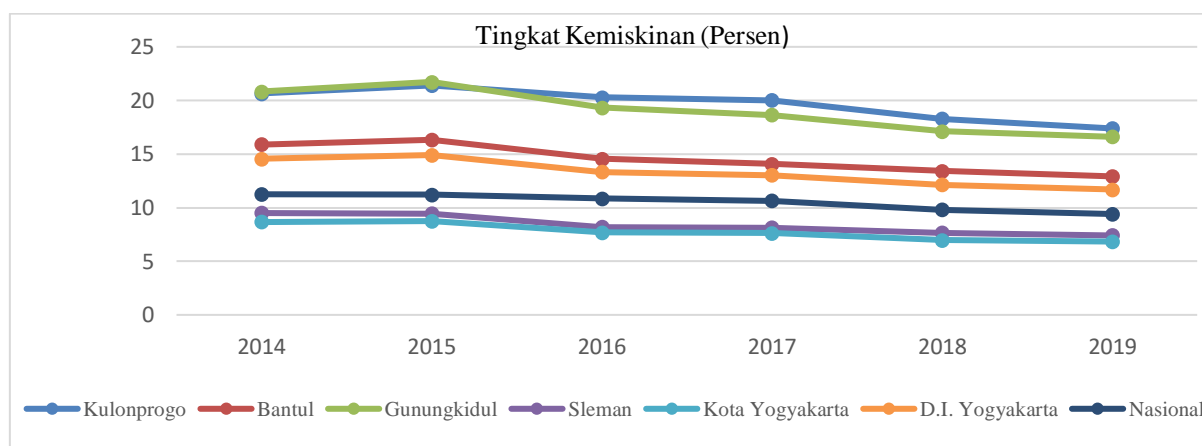
The problem of poverty in 5 Regencies/Cities of the Special Region of Yogyakarta when measured by the percentage of poor people (Head Count Index) has decreased but tends to be slow in 2014-2019 and this problem is a challenge for the government because the poverty rate is still high in the first rank in Java and above the national poverty rate. This happens because the number of people who experience an increase every year will have an impact on reducing the number of household savings, the increase in HDI tends to be very slow and there are still areas that are lagging behind the national average, the minimum wage is relatively low so that people find it difficult to meet their needs. live a normal life and the number of employment in DIY is moving very slowly because of the limited number of jobs in DIY. This study uses panel data regression analysis technique with the data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency. The results obtained indicate that the population, minimum wage, employment have an effect while HDI has no effect on poverty. Suggestions for further researchers are to add other variables that affect poverty so as to produce more useful research and the difference in the results of the independent variables used must be further proven in theory.

Keywords: Poverty, population, human development index, minimum wage, employment.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah nasional yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia sebagai mana yang diungkapkan dalam teori kemiskinan dalam buku yang dikarang oleh Nurkse tahun 1953, yang mengemukakan bahwa kemiskinan yang tinggi terjadi karena jumlah penduduk yang semakin banyak sehingga menyebabkan turunnya investasi masyarakat baik pada pendidikan dan kesehatan yang dapat menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Rendahnya kualitas hidup menyebabkan produktivitas rendah dan kemiskinan tinggi. Produktivitas yang rendah akan menyebabkan pendapatan yang diterima di bawah minimum sehingga masyarakat miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Rendahnya pendapatan dapat dipicu oleh rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja selain itu proses penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja yang minim di Indonesia menyebabkan penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari hari sehingga kemiskinan menjadi tinggi.

Masalah nasional yang dihadapi oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah masih tingginya tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di DIY bila dibandingkan dengan lima provinsi lainnya di Pulau Jawa masih tergolong paling tinggi, hal ini terjadi karena sumber daya dan lapangan kerja yang dimiliki terbatas, dengan adanya fenomena ini peneliti memilih daerah di Kabupaten/Kota DIY sebagai lokasi penelitian. Menurut BPS (2020), pada tahun 2019 Provinsi DIY memiliki tingkat kemiskinan nomor 1 di Pulau Jawa dan urutan ke 12 dari seluruh provinsi di Indonesia, perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota DIY dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) terlihat mengalami penurunan yang dapat dilihat pada grafik 1 :



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Grafik 1. Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota DIY dan Nasional Tahun 2014-2019 (Persen)

Dapat dilihat di grafik 1, kemiskinan Provinsi DIY di tahun 2014 sebesar 14.55% dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 14.91%. Hal ini disebabkan oleh data penerima bantuan yang tidak akurat sehingga bantuan dari pemerintah untuk menyediakan jamsos belum tepat sasaran sehingga menyebabkan angka penurunan kemiskinan itu lambat (Luckynuari, 2019). Angka kemiskinan Provinsi DIY masih lebih tinggi dari angka nasional hal ini dapat dilihat pada tahun 2019, kemiskinan di DIY tercatat 11,7% atau lebih tinggi 2,29% dari tingkat kemiskinan nasional. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu kemiskinan yang lebih tinggi dari kemiskinan nasional sehingga masalah kemiskinan ini harus diteliti lebih lanjut agar penduduk di DIY tidak terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Kabupaten Kulon Progo menyandang daerah dengan kemiskinan tertinggi se-DIY, hal ini disebabkan karena wilayahnya memiliki tanah yang gersang sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana (Astuti & Lestari, 2018).

Jumlah penduduk adalah permasalahan mendasar bagi kemiskinan dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tidak teratur bisa menyebabkan kesejahteraan rakyatnya tidak tercapai sehingga ada pengaruh antara penambahan jumlah penduduk terhadap kemiskinan (Didu & Fauzi, 2016).

Kualitas sumber daya manusia adalah faktor penyebab terjadinya kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia yang terdiri dari tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan daya

beli, ini merupakan indikator pembangunan yang berkorelasi negatif dengan kondisi kemiskinan di daerah tersebut, oleh karena itu semakin tinggi nilai IPM di suatu daerah, maka idealnya kualitas hidup masyarakat akan semakin baik dan angka kemiskinan juga rendah (Fahriska dkk, 2020).

Menurut Agustina (2019), faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah upah karena pendapatan penduduk mencapai maksimal apabila keadaan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh bisa tercipta melalui adanya upah minimum yang diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. Berbagai solusi yang dilakukan pemerintah DIY dalam mengatasi kemiskinan yaitu melalui peningkatan pendapatan sehingga terlihat terjadi peningkatan yang signifikan pada upah minimum DIY.

Menurut Purnomo & Kusreni (2019), permasalahan lain yang dapat menyebabkan kemiskinan diungkapkan dalam penelitian ini merupakan angkatan kerja yang tinggi namun lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas sehingga penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, karena tingginya jumlah penyerapan tenaga kerja sebagai modal untuk pembangunan daerah sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan apabila tenaga kerja yang terserap tidak diimbangi dengan penurunan tingkat kemiskinan maka kualitas lapangan pekerjaan yang ada perlu diperbaiki dengan pemberian jamsos. Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta?
- c. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta?
- d. Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta?

Dari rumusan masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka tujuan masalah yang dapat diperoleh adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, upah minimum, penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE

Penelitian ini sampelnya menggunakan teknik *non probability sampling*. Menurut Sugiyono (2017), *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh di mana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Sampel penelitian diambil sebanyak 30 sampel yang didapat dari banyaknya daerah penelitian yang diambil yaitu 5 Kabupaten/Kota DIY dikali dengan periode tahun 2014-2019 yaitu sebanyak 6 tahun. Pada penelitian ini jenis pengumpulan data dan informasi yang dipakai menggunakan data sekunder yang didapat secara tidak langsung dan dipublikasikan oleh pihak lain untuk dijadikan objek penelitian yaitu berasal dari badan pusat statistik. Data di dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dan data diolah menggunakan program *Eviews 10*. Data panel pada penelitian ini adalah penggabungan data *time series* dengan data *cross section*. Persamaan regresi data panel adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- | | |
|---|--|
| Y | : Kemiskinan (Persen) |
| X ₁ | : Jumlah Penduduk (Jiwa) |
| X ₂ | : Indeks Pembangunan Manusia (Persen) |
| X ₃ | : Upah Minimum (Juta Rupiah) |
| X ₄ | : Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa) |
| i | : Daerah (Kabupaten/Kota Provinsi DIY) |
| t | : Waktu (2014-2019) |
| β ₀ | : Konstanta |
| β ₁ , β ₂ , β ₃ , β ₄ | : Koefisien |

ε_{it} : Variabel Pengganggu

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan logaritma berganda. Hasil regresi akan diubah dalam bentuk logaritma berganda dengan menggunakan logaritma natural (LN). Variabel-variabel yang memiliki satuan juta rupiah seperti, upah minimum dan satuan jiwa yaitu jumlah penduduk dan penyerapan tenaga kerja perlu ditransformasikan ke dalam bentuk satuan persen (%) (Benny, 2013). Persamaan diatas diubah ke dalam bentuk logaritma natural sehingga menjadi:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LN } X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 \text{Ln } X_{3it} + \beta_4 \text{Ln } X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : Kemiskinan pada daerah i dan tahun t
 $\text{LN } X_{1it}$: Log natural Jumlah Penduduk pada daerah i dan tahun t
 X_{2it} : Indeks Pembangunan Manusia pada daerah i dan tahun t
 $\text{Ln } X_{3it}$: Log natural Upah Minimum pada daerah i dan tahun t
 $\text{Ln } X_{4it}$: Log natural Penyerapan Tenaga Kerja pada daerah i dan tahun t
i : Daerah (Kabupaten/Kota Provinsi DIY)
t : Waktu (2014 hingga 2019)
 β_0 : Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien
 ε_{it} : Variabel Pengganggu

Langkah awal pengolahan data adalah melakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid dengan data yang digunakan secara teori adalah tidak bias, konsisten dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Gujarati & Porter, 2013). Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas. Langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi model regresi data panel dengan menggunakan *common effect model*, *random effect model*, *fixed effect model*. Pemilihan kesesuaian model yang terbaik dan akan digunakan untuk melakukan analisis yaitu dengan 2 cara, pertama menggunakan uji chow dengan cara memilih antara *common effect model* atau *fixed effect model*, kedua uji *hausman* untuk memilih antara *fixed effect model* dengan *random effect model*. Langkah terakhir yaitu uji signifikansi yang digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel *independent* terhadap variabel *dependent* yang terdiri atas uji T, uji F, uji *Rsquared* dan *adjusted Rsquared*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai bahwa variabel pengganggu atau *residual* memiliki distribusi normal. Jika nilai probabilitas Jarque-Bera > 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa error term terdistribusi dengan normal begitu pula sebaliknya. Nilai hitung dari nilai probabilitas Jarque-Bera adalah 0.625981 > 0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *residual* terdistribusi normal yang berarti asumsi klasik tentang normalitas sudah terpenuhi atau tidak terdapat masalah normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk melihat apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Pengujian dilakukan dengan melihat nilai korelasi di antara variabel bebas dengan menggunakan korelasi antar variabel *independent*, apabila < 0.9 maka telah terbebas dari permasalahan multikolinieritas dan begitu pula sebaliknya. Terlihat pada tabel di bawah ini hasil pengujian untuk uji multikolinieritas:

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

	LN_JP	IPM	LN_UM	LN_PTK
LN_JP	1	0.09	-0.02	0.99
IPM	0.09	1	0.49	-0.01
LN_UM	-0.02	0.49	1	-0.01
LN_PTK	0.99	-0.01	-0.01	1

Sumber: hasil olah data E-Views 10

Berdasarkan hasil uji output matrik korelasi di atas dapat terlihat korelasi antara LN_JP dan LN_PTK sebesar 0.99. Hal ini dapat menunjukkan pada model regresi di atas terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode ruang atau waktu dengan kesalahan pada ruang atau waktu sebelumnya. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson (*DW test*). Berikut nilai Durbin-Watson dari hasil analisis regresi data panel :

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	1.964011
--------------------	----------

Sumber: hasil olah data E-Views 10

Dari hasil uji autokorelasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai DW adalah 1.964011, untuk melihat ada tidaknya masalah autokorelasi dilihat dengan cara membandingkan nilai DW dengan tabel DW. Dalam penelitian ini $n = 30$, $k = 5$, $dL = 1.14262$ dan $dU = 1.73860$. Karena nilai $du (1.73860) < d (1.964011) < 4-du (2,035989)$ sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji model regresi apakah ada ketidaksamaan varian *residual* satu dari pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas ini memakai metode uji *glejser*. Jika nilai probabilitas < 0.05 maka terjadi heteroskedastisitas dan begitu pula sebaliknya. Terlihat pada tabel di bawah ini hasil pengujian untuk uji heteroskedastisitas:

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Variable	Prob.
C	0.3304
LN_JP	0.2795
IPM	0.3186
LN_UM	0.1605
LN_PTK	0.0709

Sumber: hasil olah data E-Views 10

Kesimpulan : maka dapat diambil kesimpulan bahwa data ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Hausman

Metode dengan uji Hausman memiliki tujuan untuk memilih model yang baik di antara *fixed effect model* dan *random effect model* melalui cara melihat hasil probabilitasnya dengan nilai *alpha*. Perumusan hipotesis nya adalah sebagai berikut:

- H_0 : *Random Effect*, jika nilai *Chi-square*nya tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$.
- H_1 : *Fixed Effect*, jika nilai *Chi-square*nya signifikan pada $\alpha = 5\%$.

Dari hasil regresi yang dilakukan didapat hasil probabilitas sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.463735	4	0.0142

Sumber: hasil olah data E-Views 10

Berdasarkan pada tabel di atas, diperoleh nilai distribusi *chi-square* yaitu sebesar 12.463735 dengan probabilitas *chi-square* 0.0142 dimana lebih kecil dari *alpha* 0.05 ($0.0142 < 0.05$) maka menolak H_0 . Artinya, dalam penelitian ini metode estimasi terbaik yang digunakan merupakan *fixed effect model*

Fixed Effect Model (FEM)

Berdasarkan pengujian di atas, *Fixed Effect Model* (FEM) telah dipilih 2 kali, yakni pada *chow test* dan *hausman test* sedangkan *common effect model* dan *random effect model* pada pengujian ini tidak terpilih sama sekali. Hasil regresi metode *fixed effect* ditampilkan di tabel sebagai berikut ini :

Tabel 5. Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error
C	-1269.416	530.9007
LN_JP	124.9005	45.91654
IPM	-0.182866	0.470800
LN_UM	-20.12798	5.572758
LN_PTK	-7.518652	3.182774

Sumber: hasil olah data E-Views 10

$$\begin{aligned} \text{Kem}_{it} &= \beta_0 + \beta_1 \text{LN_JP}_{it} + \beta_2 \text{IPM}_{it} + \beta_3 \text{LN_UM}_{it} + \beta_4 \text{LN_PTK}_{it} + \varepsilon_{it} \\ \text{Kem}_{it} &= -1269.416 + 124.9005 \text{LN_JP}_{it} - 0.182866 \text{IPM}_{it} - 20.12798 \text{LN_UM}_{it} \\ &\quad - 7.518652 \text{LN_PTK}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Hasil regresi menghasilkan nilai konstanta pada angka -1269.416 yang menunjukkan bahwa jika variabel jumlah penduduk, IPM, upah minimum dan penyerapan tenaga kerja dianggap tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan maka nilai dari variabel kemiskinan memiliki nilai sebesar -1269.416.

Pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan sebesar 124.9005 dan signifikan. Artinya setiap kenaikan rata-rata jumlah penduduk sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan kenaikan kemiskinan sebesar 124.9005 satuan dengan asumsi variabel *independent* yang lain nilainya tetap. Hal tersebut mengartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara jumlah penduduk dengan kemiskinan.

Pengaruh IPM terhadap kemiskinan sebesar -0.182866 dan tidak signifikan. Artinya setiap kenaikan IPM sebesar 1 satuan akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar -0.182866 satuan dengan asumsi variabel *independent* yang lain nilainya tetap. Hal tersebut mengartikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara IPM dengan kemiskinan.

Pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan sebesar -20.12798 dan signifikan. Artinya setiap kenaikan rata-rata upah minimum sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar -20.12798 satuan dengan asumsi variabel *independent* yang lain nilainya tetap. Hal tersebut mengartikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara upah minimum dengan kemiskinan.

Pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan sebesar -7.518652 dan signifikan. Artinya setiap kenaikan rata-rata penyerapan tenaga kerja sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar -7.518652 satuan dengan asumsi variabel *independent* yang lain nilainya tetap. Hal tersebut mengartikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara penyerapan tenaga kerja dengan kemiskinan.

Uji T

Uji T digunakan untuk melihat berpengaruh secara signifikan atau tidak variabel-variabel *independent* terhadap variabel *dependent* secara individu. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau melihat kolom signifikansi pada masing-masing t_{hitung} . Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $< \alpha$ (0.05) maka H_1 diterima, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas $> \alpha$ (0.05) maka H_0 diterima.

Tabel 6. Hasil Uji T

Variable	t-Statistic	Prob.
C	-2.391062	0.0262
LN_JP	2.720164	0.0128
IPM	-0.388416	0.7016
LN_UM	-3.611852	0.0016
LN_PTK	-2.362295	0.0279

Sumber: hasil olah data E-Views 10

Berdasarkan hasil regresi di atas, jumlah penduduk memiliki $t_{hitung} (2.720164) > t_{tabel} (2.06)$. Nilai probabilitas variabel jumlah penduduk sebesar 0.0128 lebih kecil dari $\alpha=5\%$ ($0.0128 < 0.05$), sehingga secara statistik variabel jumlah penduduk (LN_JP) berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya var jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap (var terikat), oleh sebab itu Hipotesis 1 dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil regresi di atas, IPM memiliki $t_{hitung} (-0.182866) < t_{tabel} (2.06)$. Nilai probabilitas variabel IPM sebesar 0.7016 lebih besar dari $\alpha=5\%$ ($0.7016 > 0.05$), sehingga secara statistik variabel indeks pembangunan manusia (IPM) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang artinya var IPM tidak memiliki pengaruh terhadap (var terikat), oleh sebab itu Hipotesis 2 dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hasil regresi di atas, upah minimum memiliki $t_{hitung} (-3.611852) > t_{tabel} (2.06)$. Nilai probabilitas variabel upah minimum sebesar 0.0016 lebih kecil dari $\alpha=5\%$ ($0.0016 < 0.05$), sehingga secara statistik variabel upah minimum (LN_UM) berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya var upah minimum memiliki pengaruh terhadap (var terikat), oleh sebab itu Hipotesis 3 dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil regresi di atas, penyerapan tenaga kerja memiliki $t_{hitung} (-2.362295) > t_{tabel} (2.06)$. Nilai probabilitas variabel penyerapan tenaga kerja sebesar 0.0279 lebih kecil dari $\alpha=5\%$ ($0.0279 < 0.05$), sehingga secara statistik variabel penyerapan tenaga kerja (LN_PTK) berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya var penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap (var terikat), oleh sebab itu Hipotesis 4 dinyatakan diterima.

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel *independent* secara bersama-sama terhadap variabel *dependent* dan membuktikan model yang digunakan dalam penelitian telah layak untuk dilanjutkan pengujian selanjutnya.

Tabel 7. Hasil Uji F

F-statistic	347.0564
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: hasil olah data E-Views 10

Nilai F_{hitung} diperoleh sebesar 347.0564 sedangkan F_{tabel} sebesar 2.76, sehingga diperoleh hasil $F_{hitung} (347.0564) > F_{tabel} (2.76)$ dan probabilitas sebesar $0.000000 < \alpha = 5\%$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel *independent* jumlah penduduk, IPM, upah minimum, penyerapan tenaga kerja secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel *dependent* dalam hal ini kemiskinan (Y).

Koefisien determinasi *Rsquared* dan *adjusted rsquared*

Koefisien determinasi *R-Squared* digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel *dependen*. Nilai yang hampir mendekati 1 berarti variabel-variabel *independent* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel *dependent*. Untuk regresi berganda digunakan *adjusted-R²*. Koefisien determinasi *adjusted R²* digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Pengukuran nilai koefisien determinasi (*adjusted R²*) berkisar antara 0 sampai satu. Apabila *Adjusted R²* semakin besar atau mendekati angka satu maka semakin baik modelnya.

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.992493
Adjusted R-squared	0.989633

Sumber: hasil olah data E-Views 10

Nilai R^2 sebesar 0.992493 artinya adalah variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk, IPM, upah minimum dan penyerapan tenaga kerja sebesar 99.25% dan sisanya yaitu sebesar 0.75% dapat dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian ini. Serta nilai *adjusted R²* sebesar 0.989633 yang artinya variabel terikat kemiskinan dipengaruhi oleh variabel bebas jumlah penduduk, IPM, upah minimum dan penyerapan tenaga kerja sebesar 98,96% dan sisanya sebesar 1,04% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Pengaruh Variabel Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil pengujian model *fixed effect* ini membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang menunjukkan jumlah penduduk mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DIY. Menurut Nurkse (1964), jumlah penduduk bukanlah satu faktor penentu yang asasi karena satu negara yang memiliki jumlah penduduk banyak serta penduduk tersebut berproduktivitas tinggi maka akan membantu menurunkan permasalahan jumlah kemiskinan. Teori Nurkse ini sesuai dengan keadaan nyata yang dialami oleh daerah DIY dan berlawanan dengan penjelasan teori oleh Malthus yang menggambarkan populasi suatu negara merupakan masalah yang serius, menurutnya populasi penduduk apabila tidak dicegah maka akan berlipat ganda setiap 30 atau 40 tahun dan pada waktu yang bersamaan persediaan sumber daya alam, lahan dan faktor-faktor produksi lainnya mulai berkurang sehingga terjadilah kelangkaan sumber daya yang menyebabkan pendapatan per kapita menjadi rendah atau biasa disebut kemiskinan absolut dengan kata lain jika perkembangan sumber daya tidak dapat mendukung perkembangan jumlah penduduk maka akan menyebabkan kemiskinan dan teori ekonomi oleh Todaro yang mengatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan sehingga hasil regresi data penelitian ini lebih mendukung kepada teori Malthus dan Todaro namun hasil keadaan nyata mendukung ke teori Nurkse.

Hasil uji ini sejalan dengan penelitian oleh Hutagaol dkk (2019) yang membuktikan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan di semua provinsi Indonesia sehingga sejalan dengan hasil penelitian ini bahwa jumlah penduduk berhubungan positif tapi dalam keadaan nyatanya hanya terjadi pada tahun 2014-2015, selebihnya kemiskinan perlahan menurun. Hasil olah data memang sesuai dengan teori Malthus namun tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Ada beberapa hal yang menjadikan jumlah penduduk sebagai faktor penghambat pembangunan dan memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang naik akan mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan akan membuat prospek pembangunan semakin jauh. Pertambahan penduduk tanpa diikuti dengan kemajuan faktor-faktor pembangunan lainnya maka tidak akan meningkatkan pendapatan dan permintaan sehingga pertumbuhan penduduk justru akan menurunkan tingkat pendapatan yang berarti menurunkan biaya produksi. Jumlah penduduk di DIY semakin meningkat setiap tahunnya dan menyebabkan peningkatan pertumbuhan angkatan kerja akan tetapi seiring dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang berjalan lambat di DIY maka tidak semua angkatan kerja yang tersedia mampu diserap oleh lapangan kerja sehingga kemiskinan di DIY masih tertinggi nomor 1 di Pulau Jawa. Semakin tinggi pertumbuhan jumlah penduduk maka akan meningkatkan jumlah angkatan kerja dan jika hal ini tidak dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja maka masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan akan meningkat (Desmintasi & Ariani, 2014).

Analisis Pengaruh Variabel Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil pengujian model *fixed effect* ini membuktikan bahwa IPM tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DIY. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis bahwa IPM berpengaruh terhadap kemiskinan sehingga hipotesis nol (H_0) diterima. Hal ini disebabkan oleh tiga indikator yaitu pertama, pendidikan yang dipengaruhi dengan adanya sektor lapangan pekerjaan yakni pertanian yang mendominasi di Kabupaten/Kota DIY sehingga tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi. Kedua, kesehatan yaitu indeks angka harapan hidup ini berkorelasi kuat dengan angka kematian bayi di DIY yang cukup tinggi, hal ini mengakibatkan penderita gizi buruk pada anak-anak masih tergolong tinggi dan penyebab lainnya yaitu banyaknya penduduk lanjut usia, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bekerja lagi sehingga mengakibatkan para lansia hanya mengandalkan pemberian dari orang lain padahal kebutuhan mereka sangat banyak sehingga mereka menjadi miskin. Ketiga, standar hidup layak di DIY masih sangat rendah di kalangan rakyat miskin karena mereka sudah merasa cukup dengan kebutuhan pokoknya saja seperti kebutuhan sandang dan pangan seadanya dan tidak berlebihan. Nilai IPM DIY yang besar tidak terlalu mempengaruhi kemiskinan karena bisa dilihat bahwa sesuai faktanya yaitu IPM di DIY sangatlah baik bahkan berada di peringkat kedua tertinggi secara nasional di bawah wilayah ibukota kita yaitu Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi dengan tingginya angka IPM ini tidak berpengaruh secara signifikan dalam mengentaskan

kemiskinan sehingga tidak secara drastis menurunkan kemiskinan karena tingkat kemiskinan di DIY masih tertinggi nomor 1 di Pulau Jawa dan di atas rata-rata nasional (Niswati, 2014).

Pada penelitian ini membuktikan bahwa nilai koefisien IPM sebesar -0.182866, berarti setiap variabel IPM yang mengalami peningkatan 1 satuan maka akan menurunkan kemiskinan sebesar -0.182866 satuan sehingga arah koefisien dari pengujian ini hasilnya sudah sesuai dengan teori dan konsep IPM akan tetapi karena penelitian ini menunjukkan hasil probabilitas yang tidak signifikan maka hal ini tidak sesuai dengan teori Nurkse yang mengatakan bahwa IPM mempunyai pengaruh untuk menurunkan kemiskinan tetapi variabel ini tetap merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan begitu saja karena tingginya IPM akan menyebabkan naiknya produktivitas kerja dan akan meningkatkan penghasilan sehingga masyarakat mampu mencukupi kebutuhannya dan tingkat kemiskinan berkurang (Nurkse, 1964). Hasil penelitian ini didukung penelitian dari Susilowati & Suliswanto (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel IPM dengan kemiskinan di Indonesia. Hasil ini juga menunjukkan persamaan dengan penelitian dari Syaifullah & Malik (2017) yang menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 4 Negara ASEAN dan daerah penelitian ini sama dengan daerah DIY yaitu angka IPM yang selalu meningkat akan tetapi penyebab tidak signifikan karena indeks harapan hidup yang tidak menyentuh penduduk miskin secara keseluruhan, kedua yaitu hanya sebagian kecil orang yang menikmati pendidikan, ketiga taraf hidup masyarakat miskin masih sangat rendah.

Analisis Pengaruh Variabel Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil pengujian model *fixed effect* ini membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima yang artinya hasil tersebut sejalan dengan hipotesis yang menunjukkan upah minimum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DIY. Hal ini didukung oleh teori upah oleh Nurkse dan Malthus yaitu jika tenaga kerja diberi upah di bawah upah yang berlaku maka akan mempengaruhi tabungan dan kemakmuran akan berkurang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rosalia Lukita Sari dan Rifki Khoirudin (2019), dari hasil estimasi dan pengujian statistik diperoleh hasil bahwa upah minimum kabupaten memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Madura. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat masyarakat yang berpendapatan rendah dan memiliki tujuan untuk mencapai standar hidup minimum serta merupakan indikator yang mempengaruhi pendapatan di masyarakat untuk menjadi tinggi atau rendah. Hal ini sesuai dengan faktanya bahwa upah minimum di DIY yang mengalami peningkatan setiap tahunnya karena kebijakan PemProv (gubernur) agar masyarakat bisa meningkatkan daya beli dan membuat para pekerja lebih termotivasi dalam meningkatkan produktivitas kerjanya. Fakta lainnya yaitu banyak golongan masyarakat yang umumnya meninggalkan daerah asalnya secara permanen untuk mencari pekerjaan di daerah seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang memiliki upah minimum tinggi sehingga daerah yang memperoleh manfaat justru bukan daerah yang membesarkan mereka tapi daerah yang dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi sehingga dapat dilihat bahwa Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki kemiskinan terendah di DIY. Kebijakan upah minimum di suatu daerah yang rendah akan berdampak pada rendahnya pendapatan yang diperoleh masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan akan menurun (Miswar, 2018).

Analisis Pengaruh Variabel Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil pengujian model *fixed effect* ini membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa penyerapan tenaga kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan teori penyerapan tenaga kerja oleh Nurkse yaitu rendahnya proses penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tenaga kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan menjadi rendah dan kemiskinan menjadi tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ansori, Joko Priyono (2018), yang diperoleh hasil bahwa penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Salah satu cara untuk menurunkan kemiskinan yaitu melakukan investasi untuk tenaga kerja agar dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga dengan begitu masyarakat DIY dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal ini sejalan dengan fakta yang terjadi bahwa lapangan usaha di DIY masih didominasi oleh pertanian sehingga perlu dilakukan terobosan baru berupa investasi di bidang teknologi, alat-alat pertanian dan bibit unggul, ketika masa puncak panen tanaman pangan tiba akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di wilayah sekitarnya, selama periode tersebut permintaan pekerja pertanian meningkat, hal ini didukung oleh pernyataan Nurkse bahwa sektor pertanianlah yang menyerap sebagian besar tenaga kerja negara yang miskin (Nurkse, 1964).

SIMPULAN

Jumlah penduduk berpengaruh terhadap variabel kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini disebabkan karena jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi dimana tingkat kelahiran penduduk masih sangat tinggi. Pemerintah sudah berusaha semaksimal untuk meningkatkan kesejahteraan namun pertumbuhan penduduk melebihi daripada perkiraan pemerintah.

Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena sektor lapangan kerja yang mendominasi di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta yakni sektor pertanian yang tidak membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, banyaknya lansia yang tidak produktif dan standar hidup layak yang rendah sehingga kemiskinan tidak selalu dipengaruhi oleh tingginya IPM di DIY.

Upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi upah minimum maka kemiskinan di Kabupaten/Kota DIY akan menurun. Penetapan kebijakan upah minimum ini bertujuan untuk memberikan penghasilan yang layak bagi pekerja agar produktivitas pekerja meningkat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan serta melindungi pekerja agar tidak terjatuh dalam lingkaran kemiskinan.

Penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat disimpulkan semakin tinggi penyerapan tenaga kerja maka kemiskinan di Kabupaten/Kota DIY akan menurun. Lapangan kerja di DIY didominasi oleh pertanian karena kemudahan dalam menyerap tenaga kerja yang tidak memerlukan syarat-syarat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 265–283. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13022>
- Ansori, & Priyono, J. (2018). Analisis Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Dan Upah Minimum Pekerja Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 3(1), 561.
- Astuti, M., & Lestari, I. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 18(2). Diambil dari <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaazi/article/view/29>
- Benny, J. (2013). Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 1406–1415.
- BPS. (2020). *Statistik Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020* (S. W. Darma & J. Nawawi, ed.). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diambil dari <https://yogyakarta.bps.go.id>
- Desmintasi, & Ariani, N. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Ekonomi dan Pendidikan yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2003 - 2012*. 17.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 102–117. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>
- Fahrika, A. I., Salam, H., & Buhasyim, M. A. (2020). Effect of Human Development Index (HDI), Unemployment , and Investment Realization toward Poverty in South Sulawesi- Indonesia. *The International Journal of Social Sciences World TIJOSSW*, 2(02).

- Hutagaol, D. T., Tarmizi, H. B., & Daulay, M. (2019). *An Analysis on the Influence of Population Growth Rate , Economic Growth , Human Development Index , Income Distribution , and Unemployment Rate toward Poverty in All Provinces in Indonesia*. 6(January), 100–108.
- Luckynuari, P. A. (2019). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta). *Diponegoro Journal Of Economics*, 1(1), 80–87.
- Miswar. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah Pekerja Di Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 5(1), 17–34.
- Niswati, K. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2011. *Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 9(2), 82–89.
- Nurkse, R. (1964). *Masalah Pembentukan Modal di Negara-Negara jang Sedang Membangun*. Jakarta: Bhratara.
- Purnomo, A. B., & Kusreni, S. (2019). Pengaruh Investasi, PDRB Dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, 29(April), 79–93. <https://doi.org/10.20473/jeba.V29I22019.6213>
- Sari, R. L., & Khoirudin, R. (2019). Determinan Tingkat Kemiskinan di Pulau Madura. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 2.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, D., & Suliswanto, M. S. W. (2015). Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Utang Luar Negeri Dan Kemiskinan (Kajian Teoritis Di Indonesia). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 89. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.89-106>
- Syaifullah, A., & Malik, N. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4 (Studi Pada 4 Negara ASEAN). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 107–119. Diambil dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/download/6071/5525>